

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Selama bertahun-tahun, industri konstruksi Indonesia didominasi oleh pengadaan tradisional. Pengadaan tradisional adalah sistem pengadaan yang melibatkan tiga entitas yaitu pengguna jasa, penyedia jasa, dan konsultan. Namun, selain sistem pengadaan tradisional, ada sistem pengadaan lain yaitu *Design and Build (DB)* atau rancang bangun. Rancang bangun adalah sebuah sistem pengadaan yang melibatkan kontraktor dari tahap desain hingga pelaksanaan (Ndekugri & Turner, 1994). Dengan demikian, dalam sistem ini hanya ada dua entitas yang terlibat yaitu kontraktor dan pemilik saja (tidak ada konsultan perencana). Dengan konsep ini, maka kontraktor bertanggung jawab atas perancangan dan pembangunan proyek. Rancang bangun mulai populer dikarenakan kelebihan yang diberikannya dibandingkan sistem pengadaan lain. Menurut Ndekugri & Turner (1994), Songer & Molenaar (1996), dan Akintoye (1994) kelebihan dan alasan mengapa pihak pemilik memilih sistem rancang bangun dibanding sistem tradisional adalah durasi proyek lebih cepat dikarenakan tidak ada proses perdebatan mengenai desain. Durasi proyek yang cepat juga membuat biaya proyek menjadi lebih murah. Selain dua manfaat di atas, kontraktor juga mendapat manfaat dari segi desain karena desain berasal pihak kontraktor sendiri jadi sudah pasti dapat dibangun (*buildable*). Selain itu, bagi pihak pemilik, keuntungan sistem rancang bangun adalah adanya transfer risiko proyek kepada pihak kontraktor. Transfer risiko membuat risiko perencanaan yang tadinya berada pada pihak pemilik (apabila menggunakan sistem tradisional) berpindah kepada pihak kontraktor. Akibat dari transfer risiko dalam sistem rancang bangun, faktor risiko kontraktor bertambah. Dalam penelitian Oetomo (2018), manajemen komunikasi merupakan faktor risiko terpenting. Sebagai perencana dan pelaksana dalam sistem rancang bangun, kontraktor harus memiliki komunikasi internal yang baik (Pheng & Yeap, 2001). Misalnya, hubungan yang baik dari tiap divisi berfungsi untuk menentukan edisi gambar yang paling baru sehingga divisi pelaksanaan tidak salah menggunakan gambar dalam pelaksanaan lapangan.

Mendukung pertumbuhan sistem rancang bangun di Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi Permen PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 12/PRT/M/2017 yang berperan sebagai pedoman sistem pengadaan rancang bangun di Indonesia. Selain itu, pernyataan resmi dari menteri PUPR mengatakan bahwa proyek infrastruktur pemerintah akan menerapkan sistem rancang bangun karena dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu dibanding metode tradisional. Untuk benar-benar memaksimalkan keunggulan dari sistem rancang bangun pada proyek, maka faktor keberhasilan dari proyek rancang bangun yaitu manajemen komunikasi harus diketahui terlebih dahulu.

Manajemen komunikasi adalah pengaturan jalur informasi di dalam proyek sehingga informasi bisa diterima dan dipahami dengan baik (Project Management Insitute, 2017). Manajemen komunikasi berfungsi untuk membuat kesepakatan informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain supaya pekerjaan para pihak bisa didasarkan oleh hal yang sama (Dainty, Moore, & Murray, 2006). Hal ini dikarenakan seringkali pekerjaan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tidak konsistennya informasi sehingga pekerjaan tidak didasari oleh informasi yang sama (Gluch & Raisanen, 2009). Selain konsistensi informasi, menurut Moore & Dainty (2001) kegagalan tim proyek dalam bekerja sama dapat mengakibatkan kegagalan dalam desain dan keterlambatan pelaksanaan proyek. Penelitian dari Rostiyanti, Koesalamwardi & Winata (2018) juga menunjukkan bahwa risiko terbesar dalam proyek rancang bangun adalah isu manajemen proyek (termasuk komunikasi). Selain itu, Tam (1999) juga menambahkan bahwa penyebab biaya dan waktu berlebih pada proyek adalah kombinasi dari berbagai masalah komunikasi. Penelitian-penelitian di atas cukup menunjukkan bahwa manajemen komunikasi memegang peranan sangat penting memastikan proyek rancang bangun berjalan dengan baik. Maka dari itu, penelitian mengenai faktor keberhasilan manajemen komunikasi dilakukan agar manajemen komunikasi dalam proyek rancang bangun dapat dilaksanakan dengan baik.

I.2 Rumusan Masalah

Kompleksnya manajemen komunikasi pada proyek rancang bangun melahirkan satu permasalahan yaitu “Apa saja faktor penentu keberhasilan manajemen komunikasi di proyek rancang bangun?”

I.3 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan proyek akhir adalah untuk menentukan faktor-faktor keberhasilan manajemen komunikasi di proyek rancang bangun.

I.4 Manfaat Proyek Akhir

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam merencanakan sistem manajemen komunikasi pada proyek rancang bangun sehingga kinerja proyek dapat meningkat.

I.5 Sistematika Proyek Akhir

Laporan proyek akhir terdiri dari enam bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan
Pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika proyek akhir.
- Bab II Tinjauan Literatur
Tinjauan literatur menjelaskan mengenai literatur, tulisan, dan penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti di laporan ini.
- Bab III Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data menjelaskan mengenai tahap penelitian, desain penelitian, dan teknik pengolahan data.
- Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan dan pengolahan data menjelaskan mengenai hasil data yang telah dikumpulkan dan yang akan dipakai untuk analisis di bab berikutnya.
- Bab V Analisis dan Pembahasan
Analisis dan pembahasan menjelaskan mengenai hasil data yang telah diolah menggunakan teknik pengolahan data terkait dan dijelaskan secara rinci.

- Bab VI Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan dan rekomendasi menjelaskan mengenai kesimpulan isi dari penelitian dan rekomendasi yang bisa diberikan terkait penelitian.